

# **PENGARUH MODAL DAN TENAGA KERJA PER JENIS INVESTASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN SLEMAN PASCA OTONOMI DAERAH, TAHUN 2001-2005**

**Rudy Badrudin**

STIE YKPN Yogyakarta

Jalan Seturan, Yogyakarta 55281

Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155

E-mail: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

## **ABSTRACT**

*This research analyze the effect of capital and labor of Foreign Investment, Local Investment, and Non-facility Investment on Gross Domestic Regional Product in Sleman Regency after regional autonomy. Based on research method using 3 models of regression equation with significance level of 5%, the result are capital and labor of Foreign Investment had no significant effect on Gross Domestic Regional Product in Sleman Regency; capital of Local Investment had no significant effect on Gross Domestic Regional Product in Sleman Regency and labor of Local Investment had significant effect on Gross Domestic Regional Product in Sleman Regency, capital and labor of Non-facility Investment had no significant effect on Gross Domestic Regional Product in Sleman Regency.*

**Keywords:** *capital, labor, foreign invesment, local invesment, non-facility invesment*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah (Badrudin, 2000:2). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan *moment* yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah propinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yang kuat bagi TAP MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi

terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pembiayaan daerah tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antarwilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu. Hasil pembangunan yang ditunjukkan pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dianalisis dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai PDRB tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional berencana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sleman dengan mengembangkan perekonomian akar rumput, yakni kegiatan ekonomi yang berbasis pada masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar usaha pengembangan perekonomian tersebut dapat terealisasi maka diperlukan sumber pembiayaan untuk kebutuhan investasi. Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menggali dana pembangunan secara optimal dari berbagai sumber, baik dari sumber pemerintah daerah melalui APBD maupun dari sumber masyarakat - investor. Jenis investasi yang dilakukan di Kabupaten Sleman dikelompokkan ke dalam investasi fasilitas yang meliputi investasi Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN dan investasi non-fasilitas. Nilai dan rincian investasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2001 sampai dengan 2005 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Nilai dan Rincian Investasi di Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005 (dalam Rp)**

Tahun	Investasi Fasilitas	Investasi Fasilitas	Investasi Fasilitas	Investasi	Investasi Total
	PMA	PMDN	PMA + PMDN	Non Fasilitas	Fasilitas + Non Fasilitas
2001	745,469,897,326	553,054,016,000	1,298,523,913,326	698,163,538,000	1,996,687,451,326
2002	676,599,243,750	539,057,642,000	1,215,656,885,750	745,295,665,000	1,960,952,550,750
2003	911,587,481,000	532,630,642,000	1,444,218,123,000	954,116,800,000	2,398,334,923,000
2004	828,094,258,000	525,817,642,000	1,353,911,900,000	1,045,479,089,475	2,399,390,989,475
2005	1,286,379,314,000	507,711,454,000	1,794,090,768,000	1,265,757,408,801	3,059,848,176,801

**Sumber:** P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*.

Manfaat per jenis investasi (investasi fasilitas PMA, investasi fasilitas PMDN, dan investasi non fasilitas) bagi masyarakat Sleman ditunjukkan dengan dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan angka pendapatan per kapita dari tahun 2001 sampai dengan 2005 yang absolutnya selalu meningkat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sleman selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah mencapai Rp4,922,954,-. Manfaat investasi yang masuk ke Kabupaten Sleman sehingga

berdampak terhadap peningkatan angka pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sleman terjadi di antaranya melalui penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, di samping akan menambah pendapatan masyarakat Kabupaten Sleman juga akan mengurangi angka pengangguran. Berikut ini ditunjukkan pada Tabel 2 tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 dan Tabel 3 tentang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman per jenis investasi.

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005**

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB (Rp000,-)	Pendapatan per Kapita
2001	4,135,882,000	Rp4,588,614
2002	4,874,054,000	Rp4,710,465
2003	5,285,158,400	Rp4,877,989
2004	5,817,680,400	Rp5,118,675
2005	6,350,202,400	Rp5,319,025

**Sumber:** BPS Kabupaten Sleman, Sleman Dalam Angka, Tahun 2006.

Berdasarkan Tabel 3 berikut ini, nampak penyerapan tenaga kerja per jenis investasi di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 berfluktuasi untuk setiap jenis investasi. Untuk jenis investasi PMA, penyerapan tenaga kerja cenderung

mengalami kenaikan. Untuk jenis investasi PMDN, penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami fluktuasi. Untuk jenis investasi non fasilitas, penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami kenaikan.

**Tabel 3**  
**Penyerapan Tenaga Kerja per jenis Investasi di Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005**

<b>Tenaga Kerja</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
PMA	4.495	4.640	4.696	5.472	6.248
PMDN	10.276	10.435	10.457	10.155	10.305
Non Fas	81.991	85.455	87.787	96.764	105.741
PMA+PMDN	14.771	15.075	15.153	15.627	16.101
<b>TOTAL</b>	<b>96.762</b>	<b>100.530</b>	<b>102.940</b>	<b>112.391</b>	<b>138.395</b>

**Sumber:** P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*.

Berdasarkan Tabel 1, nampak nilai investasi di Kabupaten Sleman meningkat dalam periode tahun 2001-2005. Peningkatan nilai investasi tersebut beriringan dengan perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Sleman dari struktur ekonomi yang agraris menuju ke arah industri dan jasa. Perubahan struktur ekonomi tersebut berdampak terhadap kebutuhan lahan yang mengakibatkan permintaan lahan di daerah tertentu sangat tinggi sehingga harga lahan menjadi

semakin mahal. Berikut ini ditunjukkan data pada Tabel 4 tentang perubahan struktur ekonomi (Metode Produksi) dan Tabel 5 tentang perubahan peran pelaku ekonomi (Metode Penggunaan) selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman. Penjelasan perubahan struktur ekonomi menurut metode produksi dan metode penggunaan berdasarkan pengertian bahwa keduanya menunjukkan nilai PDRB yang dihitung dari sudut pandang yang berbeda.

**Tabel 4**  
**Perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten Sleman (Metode Produksi), Tahun 2001-2005**

<b>NOMOR</b>	<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
1	Pertanian	18.97%	17.67%	18.37%	18.33%	18.29%
2	Pertambangan dan Penggalian	0.42%	0.56%	0.52%	0.54%	0.55%
3	Industri Pengolahan	15.53%	18.91%	18.12%	18.53%	18.87%
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0.79%	1.23%	1.10%	1.13%	1.16%
5	Bangunan	8.97%	8.48%	8.57%	8.50%	8.44%
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	20.55%	20.37%	20.64%	20.78%	20.89%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8.61%	8.22%	8.10%	7.97%	7.87%
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9.69%	9.30%	9.07%	8.93%	8.81%
9	Jasa-Jasa	16.47%	15.26%	15.49%	15.29%	15.13%
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

**Sumber:** BPS, Sleman Dalam Angka, 2006.

**Tabel 5**  
**Perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten Sleman (Metode Penggunaan),**  
**Tahun 2001-2005**

NOMOR	JENIS PENGGUNAAN ADHB/ADHN	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	60.30%	62.65%	63.51%	64.03%	64.46%
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.32%	0.31%	0.20%	0.17%	0.14%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	12.50%	12.26%	12.35%	12.38%	12.40%
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	42.38%	40.88%	40.21%	39.83%	39.51%
5	Perubahan Stok dan Ekspor Antardaerah	-22.58%	-22.90%	-23.37%	-23.50%	-23.62%
6	Ekspor Antarnegara / Luar Negeri	8.42%	8.15%	8.23%	8.21%	8.20%
7	Dikurangi Impor Antarnegara / Luar Negeri	1.34%	1.35%	1.13%	1.11%	1.09%

**Sumber:** BPS, Sleman Dalam Angka, 2006.

Berdasarkan Tabel 4, nampak kontribusi peran sektor pertanian cenderung semakin menurun sedang kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran cenderung semakin meningkat. Ini menunjukkan adanya permintaan lahan yang cenderung semakin meningkat sehingga akan menaikkan harga lahan di Kabupaten Sleman mengingat keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di samping itu, perubahan struktur ekonomi berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan alokasi tenaga kerja dan modal dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Tenaga kerja yang berkualitas lebih tertarik bekerja di sektor industri dan jasa daripada sektor pertanian karena mengharapkan memperoleh upah yang lebih tinggi. Bagi pemilik modal, pemanfaatan modal di sektor industri dan jasa akan mendatangkan *return on investment* yang lebih tinggi daripada di sektor pertanian.

Berdasarkan Tabel 5, nampak peran pelaku ekonomi di Kabupaten Sleman yang semakin meningkat adalah pelaku ekonomi rumah tangga dalam berkonsumsi, sedang pembentukan modal tetap domestik bruto yang menunjukkan peran investor dalam melakukan investasi

cenderung semakin menurun. Walaupun semakin turun kontribusinya, tetapi peranan investor di Kabupaten Sleman selama tahun 2001-2005 masih relatif tinggi, yaitu berfluktuasi di sekitar 40%.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang pengaruh modal dan tenaga kerja per jenis investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman Pasca Otonomi Daerah maka disusun permasalahan penelitian, yaitu 1) apakah modal pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah; 2) apakah tenaga kerja pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah; 3) apakah modal pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah; 4) apakah tenaga kerja pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah; 5) apakah modal pada jenis investasi Non Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah; dan 6) apakah tenaga kerja pada jenis investasi Non Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah lebih lanjut yang kemudian diterbitkan/ atau dilaporkan suatu lembaga. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi yang mempelajari beberapa dokumen dan naskah dari instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku serta sumber lain seperti artikel, literatur, dan jurnal dalam usaha mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Berdasarkan aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian, yaitu 1) daerah homogen, suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama dari segi pendapatan per kapita, sosial-budaya, geografis, dan sebagainya; 2) daerah nodal, suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi; dan 3) daerah perencanaan atau daerah administrasi, suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan daerah di sini didasarkan oleh pembagian administratif suatu negara (Arsyad, 2004:297).

Dalam praktik, pengertian daerah yang ketiga lebih banyak digunakan dalam membahas perencanaan pembangunan ekonomi, karena 1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah sehingga akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan suatu administratif yang ada dan 2) daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu negara pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004:298). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan

kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Teori Ekonomi Neo Klasik menjelaskan bahwa terdapat dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah. Adapun dua konsep tersebut adalah keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal dapat mengalir tanpa restriksi. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah. Teori Basis Ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Strategi pembangunan daerah yang muncul berdasarkan teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang sejak tahun 1950-an adalah teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dikemukakan oleh Solow-Swan. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Peran kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat

tinggi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa perekonomian tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh dan kapasitas perlatan modal tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan demikian, perkembangan perekonomian tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan ini didasarkan kepada fungsi produksi yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas (fungsi produksi Cobb-Douglas) yang diformulasikan sebagai berikut, yaitu  $Q = T K^a L^b$

keterangan:

Q = tingkat output pada tahun tertentu

T = tingkat teknologi pada tahun tertentu

K = jumlah stok barang modal pada tahun tertentu

L = jumlah tenaga kerja pada tahun tertentu

a = persentase perubahan output yang diciptakan oleh perubahan 1% modal

b = persentase perubahan output yang diciptakan oleh perubahan 1% tenaga kerja

Menurut Algifari (2003:149-150), analisis terhadap hubungan antara input dan output dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dapat memberikan banyak informasi mengenai karakteristik proses produksi yang dianalisis. Karakteristik proses produksi yang dapat diketahui dari persamaan  $Q = T K^a L^b$ , yaitu 1) nilai konstanta T menunjukkan tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi waktu tertentu; 2) Nilai a menunjukkan elastisitas input K. Jika teknologi dan jumlah input K yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, maka a menunjukkan besarnya persentase perubahan jumlah output setiap perubahan 1% jumlah input K yang digunakan dalam proses produksi; 3) nilai b menunjukkan elastisitas input L.

Jika teknologi dan jumlah input L yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah, maka b menunjukkan

besarnya persentase perubahan jumlah output setiap perubahan 1% jumlah input L yang digunakan dalam proses produksi; 4) jumlah nilai  $a$  dan  $b$  menunjukkan skala produksi suatu proses produksi. Jika  $a+b > 1$ , maka skala produksi tersebut adalah *increasing return to scale* yang berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input L dan input K masing-masing ditambah 1% maka output akan meningkat lebih daripada 1%. Jika  $a+b = 1$ , maka skala produksi tersebut adalah *constant return to scale* yang berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input L dan input K masing-masing ditambah 1% maka output akan meningkat sebesar 1% pula. Jika  $a+b < 1$ , maka skala produksi tersebut adalah *decreasing return to scale* yang berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan input L dan input K masing-masing ditambah 1% maka output akan meningkat kurang daripada 1%; dan 5) hasil bagi nilai  $a$  dan  $b$  menunjukkan intensitas penggunaan input dalam proses produksi. Jika pada suatu proses produksi di mana hasil bagi  $a$  dengan  $b$  lebih besar daripada 1 maka proses produksi tersebut lebih banyak menggunakan input K atau *capital intensive* (padat modal). Jika pada suatu proses produksi di mana hasil bagi  $a$  dengan  $b$  lebih kecil daripada 1 maka proses produksi tersebut lebih banyak menggunakan input L atau *labor intensive* (padat tenaga kerja). Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Robert Solow-Trevor Swan karena digunakannya bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas oleh Solow-Swan.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah dilakukan oleh Purnamawati dan Badrudin (2004) yang meneliti tentang Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, Tahun 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Skala produksi di Kabupaten

Sleman adalah *increasing return to scale* karena jumlah nilai  $a + b = 0,0171 + 1,0427 = 1,0598 > 1$ ; 2) Intensitas penggunaan input dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman lebih banyak menggunakan input modal K daripada input tenaga kerja L atau bersifat padat modal (*capital intensive*) karena  $a/b = 0,0171/1,0427 = 0,4005 < 1$ ; dan 3) Uji statistik terhadap koefisien regresi persamaan 2 (dengan uji statistik 2 sisi dan tingkat signifikansi 5%), menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001 sedang variabel modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001.

Badrudin (2009) meneliti Dampak Kegiatan Investasi Terhadap Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Sleman Pasca Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi fasilitas PMA berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sleman, investasi fasilitas PMDN berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sleman, dan investasi non fasilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sleman. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H<sub>1</sub>:** Modal pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.

**H<sub>2</sub>:** Tenaga kerja pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.

- H3:** Modal pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.
- H4:** Tenaga kerja pada jenis investasi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.
- H5:** Modal pada jenis investasi Non Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.
- H6:** Tenaga kerja pada jenis investasi Non Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman pasca Otonomi Daerah.

Definisi operasional dan pengukuran setiap variabel penelitian yang berhubungan dengan hipotesis penelitian adalah 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk yang dihasilkan dari sektor-sektor produktif di Kabupaten Sleman dalam waktu tertentu (1 tahun) yang diukur dengan satuan rupiah; 2) Modal adalah nilai investasi fasilitas yang meliputi investasi dari luar negeri (Penanaman Modal Asing atau PMA) dan investasi dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN) yang menggunakan fasilitas bea masuk dari pemerintah serta investasi non fasilitas sebagai jenis investasi yang tidak menggunakan fasilitas bea masuk dari

pemerintah, misalnya pendirian usaha yang dilakukan oleh pengembang perumahan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diukur dengan satuan rupiah; dan 3) tenaga kerja adalah jumlah orang yang bekerja di masing-masing jenis investasi yang diukur dengan satuan orang.

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 MPMA + \beta_2 TKPMA + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 MPMDN + \beta_2 TKPMDN + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 MINF + \beta_2 TKINF + e$$

keterangan:

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

MPMA = jumlah modal pada jenis investasi fasilitas PMA

TKPMA = jumlah tenaga kerja pada jenis investasi fasilitas PMA

MPMDN = jumlah modal pada jenis investasi fasilitas PMDN

TKPMDN = jumlah tenaga kerja pada jenis investasi fasilitas PMDN

MINF = jumlah modal pada jenis investasi non fasilitas

TKINF = jumlah tenaga kerja pada jenis investasi non fasilitas

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data nilai dan rincian investasi di Kabupaten Sleman pada Tabel 1, maka dapat dihitung kontribusi investasi fasilitas PMA dan PMA terhadap investasi fasilitas yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Kontribusi Investasi Fasilitas PMA dan PMDN terhadap Investasi Fasilitas di Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005**

Tahun	Investasi Fasilitas PMA	Investasi Fasilitas PMDN
2001	57.41%	42.59%
2002	55.66%	44.34%
2003	63.12%	36.88%
2004	61.16%	38.84%
2005	71.70%	28.30%
rata-rata	61.81%	38.19%

**Sumber:** P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*. Data diolah dari Tabel 1.

Nampak pada Tabel 6, selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman, rata-rata kontribusi investasi fasilitas PMA sebesar 61,81% per tahun dan investasi fasilitas PMDN sebesar 38,19% per tahun. Berarti rata-rata kontribusi investasi fasilitas PMA lebih besar daripada investasi fasilitas PMDN.

Berdasarkan data nilai dan rincian investasi di Kabupaten Sleman pada Tabel 1, maka dapat dihitung pertumbuhan investasi fasilitas PMA dan PMDN per tahun yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7**  
**Pertumbuhan Investasi Fasilitas PMA dan PMDN di Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005**

Tahun	Investasi Fasilitas PMA	Investasi Fasilitas PMDN
2001	21.95%	1.86%
2002	-9.24%	-2.53%
2003	34.73%	-1.19%
2004	-9.16%	-1.28%
2005	55.34%	-3.44%
rata-rata	18.73%	-1.32%

**Sumber:** P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*. Data diolah dari Tabel 1.

Nampak selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman, rata-rata pertumbuhan investasi

fasilitas PMA sebesar 18,73% per tahun dan investasi fasilitas PMDN sebesar -1,32% per tahun. Berarti rata-rata

pertumbuhan investasi fasilitas PMA lebih besar daripada investasi fasilitas PMDN. Besarnya rata-rata kontribusi dan pertumbuhan investasi fasilitas PMA yang lebih besar daripada investasi fasilitas PMDN di Kabupaten Sleman diduga disebabkan investor asing relatif tidak ada permasalahan dengan faktor modal sehingga otonomi daerah yang mulai berlaku per 1 Januari 2001 bagi investor asing dipandang sebagai peluang bisnis untuk meraup *return on investment*. Bagi investor lokal, faktor modal masih menjadi permasalahan sehingga otonomi daerah

yang mulai berlaku per 1 Januari 2001 belum dipandang sebagai peluang bisnis untuk meraup *return on investment* karena bunga pinjaman yang masih relatif tinggi sebagai dampak krisis ekonomi tahun 1998.

Berdasarkan data nilai dan rincian investasi di Kabupaten Sleman pada Tabel 1, maka dapat dihitung kontribusi investasi fasilitas (PMA dan PMDN) dan investasi non fasilitas terhadap total investasi yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**Kontribusi Investasi Fasilitas (PMA dan PMDN) dan Investasi Non Fasilitas terhadap Total Investasi di Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005**

Tahun	Investasi Fasilitas (PMA+PMDN)	Investasi Non Fasilitas
2001	65.03%	34.97%
2002	61.99%	38.01%
2003	60.22%	39.78%
2004	56.43%	43.57%
2005	58.63%	41.37%
rata-rata	60.46%	39.54%

**Sumber:** P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*. Data diolah dari Tabel 1.

Nampak selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman, rata-rata kontribusi investasi fasilitas (PMA dan PMDN) sebesar 60,46% per tahun dan investasi non fasilitas sebesar 39,54% per tahun. Berarti rata-rata kontribusi investasi fasilitas

(PMA dan PMDN) lebih besar daripada investasi non fasilitas.

Berdasarkan data nilai dan rincian investasi di Kabupaten Sleman pada Tabel 1, maka dapat dihitung pertumbuhan investasi fasilitas PMA dan PMDN per tahun yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Pertumbuhan Investasi Fasilitas (PMA dan PMDN) dan Investasi Non Fasilitas**  
**di Kabupaten Sleman, Tahun 2001-2005**

<b>Tahun</b>	<b>Investasi Fasilitas (PMA+PMDN)</b>	<b>Investasi Non Fasilitas</b>
2001	12.50%	10.87%
2002	-6.38%	-1.79%
2003	18.80%	22.30%
2004	-6.25%	0.04%
2005	32.51%	27.53%
rata-rata	10.24%	11.79%

**Sumber:** P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*. Data diolah dari Tabel 1.

Nampak selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman, rata-rata pertumbuhan investasi fasilitas (PMA dan PMDN) sebesar 10,24% per tahun dan investasi non fasilitas sebesar 11,79% per tahun. Berarti rata-rata pertumbuhan investasi fasilitas (PMA dan PMDN) lebih kecil daripada investasi non fasilitas. Hal ini disebabkan karena kontribusi investasi fasilitas (PMA dan PMDN) selama tahun 2001-2005 cenderung semakin menurun sedang

kontribusi investasi non fasilitas selama tahun 2001-2005 cenderung semakin meningkat.

Hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk masing-masing jenis investasi pada tingkat signifikansi sebesar 5% ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut (Subiyakto, 2004: 53) :

**Tabel 10**  
**Hasil Pengujian Hipotesis dengan Regresi**

<b>Hipotesis</b>	<b>Jenis Investasi</b>	<b><math>\beta</math></b>	<b>T test</b>	<b>P value</b>	<b>Pengujian</b>
1	Fasilitas PMA	0,0401	0,1043	0,9264	Tidak signifikan
2	Fasilitas PMA	1,0008	1,469	0,2796	Tidak signifikan
3	Fasilitas PMDN	-5,0488	-6,005	0,0266	Signifikan *)
4	Fasilitas PMDN	-0,617	-0,2785	0,8068	Tidak signifikan
5	Non Fasilitas	0,4634	1,0793	0,3933	Tidak signifikan
6	Non Fasilitas	0,4595	0,4499	0,6968	Tidak signifikan

**Sumber:** Hasil olah data.

Keterangan: \*) pada  $\alpha = 5\%$ .

Berdasarkan hasil olah data dapat dilakukan analisis terhadap bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass Kabupaten

Sleman untuk jenis investasi Fasilitas PMA sebagai berikut:

$$\ln Q = \ln 19,6471 + 0,0401 \ln K + 1,0008 \ln L \quad (\text{persamaan 1})$$

(0,1043)      (1,469)

Persamaan 1 kemudian diubah menjadi bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas

seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2 sebagai berikut:

$$Q = 19,6471 \cdot K^{0,0401} \cdot L^{1,0008} \quad (\text{persamaan 2})$$

Hasil analisis terhadap fungsi produksi Cobb-Douglas (persamaan 2) tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, skala produksi untuk jenis investasi PMA di Kabupaten Sleman adalah *increasing return to scale* karena jumlah nilai  $a + b = 0,0401 + 1,0008 = 1,0409 > 1$ . Dengan demikian, tidak adanya perubahan teknologi tetapi adanya penambahan input tenaga kerja L dan input modal K masing-masing sebesar 1% akan meningkatkan PDRB Kabupaten Sleman lebih besar daripada 1%. Kedua, intensitas penggunaan input dalam kegiatan ekonomi untuk jenis investasi PMA di Kabupaten Sleman lebih banyak menggunakan input tenaga kerja L daripada input modal K atau bersifat padat tenaga kerja (*labor intensive*) karena  $a/b = 0,0401/1,0008 = 0,0401 < 1$ .

menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel K adalah nol diterima. Dengan demikian, nilai koefisien regresi 0,0401 tidak signifikan atau dapat dianggap sama dengan nol pada tingkat signifikan 5%. Nilai t hitung variabel L (1,469) berada di daerah penerimaan  $H_0$ , karena nilai t hitung tersebut di antara  $-4,303$  dan  $4,303$  atau di antara dua t tabel  $(0,025;2) = \pm 4,303$ . Hal ini berarti  $H_0$  yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel L adalah nol diterima. Dengan demikian, nilai koefisien regresi 1,0008 tidak signifikan atau dapat dianggap sama dengan nol pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut maka disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 (lima tahun pertama pemberlakuan Otonomi Daerah) secara signifikan tidak dipengaruhi oleh variabel modal dan tenaga kerja untuk jenis investasi PMA.

Ketiga, uji statistik terhadap koefisien regresi persamaan 1 (dengan uji statistik 2 sisi dan tingkat signifikansi 5%), nampak bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  variabel K (0,1043) berada di daerah penerimaan  $H_0$ , karena nilai t hitung tersebut di antara  $-4,303$  dan  $4,303$  atau di antara dua t tabel  $(0,025;2) = \pm 4,303$ . Hal ini berarti  $H_0$  yang

Berdasarkan hasil olah data dapat dilakukan analisis terhadap bentuk fungsi produksi Cobb-Douglass Kabupaten Sleman untuk jenis investasi Fasilitas PMDN sebagai berikut:

$$\ln Q = \ln 171,3018 - 5,0488 \ln K - 0,617 \ln L \quad (\text{persamaan 3})$$

(-6,005)      (-0,2785)

Persamaan 3 kemudian diubah menjadi bentuk fungsi produksi Cobb-

Douglas seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4 sebagai berikut:

$$Q = 171,3018 \cdot K^{-5,0488} \cdot L^{-0,617} \quad (\text{persamaan 4})$$

Hasil analisis terhadap fungsi produksi Cobb-Douglas (persamaan 4) tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, skala produksi untuk jenis investasi PMDN di Kabupaten Sleman adalah *decreasing return to scale* karena jumlah nilai  $a + b = -5,0488 - 0,617 = -5,6658 < 1$ . Dengan demikian, tidak adanya perubahan teknologi tetapi adanya penambahan input tenaga kerja L dan input modal K masing-masing sebesar 1% akan menurunkan PDRB Kabupaten Sleman lebih besar daripada 1%. Kedua, intensitas penggunaan input dalam kegiatan ekonomi untuk jenis investasi PMDN di Kabupaten Sleman lebih banyak menggunakan input tenaga kerja K daripada input modal L atau bersifat padat modal (*capital intensive*) karena  $a/b = -5,0488/-0,617 = 8,1828 > 1$ .

Ketiga, uji statistik terhadap koefisien regresi persamaan 3 (dengan uji statistik 2 sisi dan tingkat signifikansi 5%), nampak bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel K (-6,005) berada di daerah penolakan  $H_0$ , karena nilai  $t_{hitung}$  tersebut tidak berada di antara -4,303 dan 4,303 atau di antara dua  $t$  tabel  $(0,025;2) = \pm 4,303$ . Hal ini

$$\ln Q = \ln 11,2720 + 0,4634 \ln K + 0,4595 \ln L \quad (\text{persamaan 5})$$

(1,0793)      (0,4499)

Persamaan 5 kemudian diubah menjadi bentuk fungsi produksi Cobb-

$$Q = 11,2720 \cdot K^{0,4634} \cdot L^{0,4595} \quad (\text{persamaan 6})$$

Hasil analisis terhadap fungsi produksi Cobb-Douglas (persamaan 6) tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, skala produksi untuk jenis investasi Non Fasilitas di Kabupaten Sleman adalah *decreasing return to scale* karena jumlah nilai  $a + b = 0,4634 + 0,4595 = 0,9229 < 1$ . Dengan demikian, tidak adanya perubahan teknologi tetapi adanya

berarti  $H_0$  yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel K adalah nol ditolak. Dengan demikian, nilai koefisien regresi 5,0488 signifikan atau dapat dianggap tidak sama dengan nol pada tingkat signifikan 5%. Nilai  $t_{hitung}$  variabel L (-0,2785) berada di daerah penerimaan  $H_0$ , karena nilai  $t_{hitung}$  tersebut di antara -4,303 dan 4,303 atau di antara dua  $t$  tabel  $(0,025;2) = \pm 4,303$ . Hal ini berarti  $H_0$  yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel L adalah nol diterima. Dengan demikian, nilai koefisien regresi -0,617 tidak signifikan atau dapat dianggap sama dengan nol pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut maka disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 (lima tahun pertama pemberlakuan Otonomi Daerah) secara signifikan hanya dipengaruhi oleh variabel modal untuk jenis investasi PMDN.

Berdasarkan hasil olah data dapat dilakukan analisis terhadap bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas Kabupaten Sleman untuk jenis investasi Non Fasilitas sebagai berikut:

Douglas seperti yang ditunjukkan pada persamaan 6 sebagai berikut:

penambahan input tenaga kerja L dan input modal K masing-masing sebesar 1% akan menurunkan PDRB Kabupaten Sleman lebih besar daripada 1%. Kedua, Intensitas penggunaan input dalam kegiatan ekonomi untuk jenis investasi Non Fasilitas di Kabupaten Sleman lebih banyak menggunakan input tenaga kerja K daripada input modal L atau bersifat padat

modal (*capital intensive*) karena  $a/b = 0,4634/0,4595 = 1,0085 > 1$ .

Ketiga, uji statistik terhadap koefisien regresi persamaan 5 (dengan uji statistik 2 sisi dan tingkat signifikansi 5%), nampak bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel K (1,0793) berada di daerah penerimaan  $H_0$ , karena nilai  $t_{hitung}$  tersebut di antara  $-4,303$  dan  $4,303$  atau di antara dua  $t$  tabel  $(0,025;2) = \pm 4,303$ . Hal ini berarti  $H_0$  yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel K adalah nol diterima. Dengan demikian, nilai koefisien regresi 0,4634 tidak signifikan atau dapat dianggap sama dengan nol pada tingkat signifikansi 5%. Nilai  $t_{hitung}$  variabel L (0,4499) berada di daerah penerimaan  $H_0$ , karena nilai  $t_{hitung}$  tersebut di antara  $-4,303$  dan  $4,303$  atau di antara dua  $t$  tabel  $(0,025;2) = \pm 4,303$ . Hal ini berarti  $H_0$  yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel L adalah nol diterima. Dengan demikian, nilai koefisien regresi 0,4595 tidak signifikan atau dapat dianggap sama dengan nol pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut maka disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 (lima tahun pertama pemberlakuan Otonomi Daerah) secara signifikan tidak dipengaruhi oleh variabel modal dan tenaga kerja untuk jenis investasi Non Fasilitas.

## PEMBAHASAN

Pengujian terhadap  $H_1$  dan  $H_2$  yang masing-masing menyatakan bahwa modal dan tenaga kerja untuk jenis investasi fasilitas PMA berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja untuk jenis investasi fasilitas PMA tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman karena investasi PMA yang masuk ke Kabupaten Sleman belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Sleman, misalnya

persyaratan keahlian ketenagakerjaan antara yang dibutuhkan PMA dengan yang ditawarkan oleh pencari kerja dari Kabupaten Sleman tidak sama. Banyak PMA di Kabupaten Sleman membutuhkan persyaratan keahlian ketenagakerjaan yang justru dapat dipenuhi oleh masyarakat di luar Kabupaten Sleman sehingga masyarakat Kabupaten Sleman tidak mampu memperoleh manfaat secara langsung keberadaan PMA tersebut.

Pengujian terhadap  $H_3$  yang menyatakan bahwa modal untuk jenis investasi fasilitas PMDN berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman terbukti. Ini menunjukkan bahwa modal untuk jenis investasi fasilitas PMDN berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman karena modal untuk jenis investasi PMDN yang masuk ke Kabupaten Sleman dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Pengujian terhadap  $H_4$  yang menyatakan bahwa tenaga kerja untuk jenis investasi fasilitas PMDN berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja untuk jenis investasi fasilitas PMDN tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman karena tenaga kerja untuk jenis investasi PMDN yang masuk ke Kabupaten Sleman belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Sleman, misalnya persyaratan keahlian ketenagakerjaan antara yang dibutuhkan PMDN dengan yang ditawarkan oleh pencari kerja dari Kabupaten Sleman relatif berbeda. Banyak PMDN di Kabupaten Sleman membutuhkan persyaratan keahlian ketenagakerjaan yang justru dapat dipenuhi oleh masyarakat di luar Kabupaten Sleman sehingga masyarakat Kabupaten Sleman tidak mampu memperoleh manfaat secara langsung keberadaan PMDN tersebut. Persyaratan pemerintah Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa 70% tenaga kerja suatu

PMDN merupakan penduduk Kabupaten Sleman memang terpenuhi pada kondisi awal PMDN tersebut beroperasi. Namun, sejalan dengan beroperasinya PMDN pada waktu-waktu berikutnya, angka 70% tenaga kerja yang semula diserap dari penduduk Kabupaten Sleman malah berkurang dengan dipekerjakannya penduduk dari luar masyarakat Kabupaten Sleman.

Pengujian terhadap H5 dan H6 yang masing-masing menyatakan bahwa modal dan tenaga kerja untuk jenis investasi Non Fasilitas berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja untuk jenis investasi Non Fasilitas tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Sleman karena investasi Non Fasilitas yang masuk ke Kabupaten Sleman belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Sleman, misalnya persyaratan keahlian ketenagakerjaan antara yang dibutuhkan pada investasi Non Fasilitas dengan yang ditawarkan oleh pencari kerja dari Kabupaten Sleman tidak sama. Banyak investasi Non Fasilitas di Kabupaten Sleman membutuhkan persyaratan keahlian ketenagakerjaan yang justru dapat dipenuhi oleh masyarakat di luar Kabupaten Sleman sehingga masyarakat Kabupaten Sleman tidak mampu memperoleh manfaat secara langsung keberadaan jenis investasi Non Fasilitas tersebut.

Sekalipun jenis investasi non fasilitas tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah, namun pemerintah Kabupaten Sleman sebagai organisasi pemegang mandat daerah akan melakukan *resources allocation* dan *resources reallocation* bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam rangka mengatur potensi kekayaan daerah baik *tangible* maupun *intangible* bagi kemaslahatan masyarakat Sleman. *Allocation* dan *reallocation* potensi kekayaan daerah pada pihak penerima

mencakup (Subiyanto, 2005: 2), yaitu hak eksploitasi kekayaan alam, hak melakukan distribusi barang/jasa, hak atas penguasaan pasar, hak pemanfaatan potensi *intellectual property right*, hak pemanfaatan tanah, dan hak produksi

*Allocation* dan *reallocation* potensi kekayaan daerah pada pihak penerima akan membentuk berbagai perijinan kepada masyarakat. Di samping itu, dalam *allocation* dan *reallocation* potensi kekayaan daerah, pemerintah Kabupaten Sleman memandang perlu melakukan distribusi dan redistribusi hasil-hasil pengelolaan potensi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sleman. *Allocation* dan *reallocation* potensi kekayaan daerah dapat diberikan kepada organisasi swasta dan perorangan, organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi negara, dan organisasi pelaksana pemerintah pusat.

Selama 5 tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman, rata-rata pertumbuhan jenis nilai investasi yang terbesar adalah investasi non-fasilitas sebesar 11,79% per tahun. Salah satu jenis investasi non-fasilitas di Kabupaten Sleman adalah investasi dalam bidang perumahan yang dilakukan oleh para pengembang *real-estate*. Pemberian ijin kepada para pengembang *real-estate* pada hakekatnya merupakan bentuk *reallocation* dan redistribusi potensi kekayaan daerah yang berupa hak pemanfaatan tanah. Dalam memberikan ijin tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan keuntungan bagi investor dan kemaslahatan masyarakat Sleman. Hal ini berarti, ijin yang diajukan oleh para pengembang *real-estate* maupun perijinan lainnya tidak harus disetujui oleh pemerintah Kabupaten Sleman manakala hal itu tidak menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat Sleman.

Peningkatan investasi di atas harus diikuti dengan adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi investor dan

manfaat bagi masyarakat Sleman, terutama golongan ekonomi lemah. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah Kabupaten Sleman yang berencana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sleman dengan mengembangkan perekonomian akar rumput. Penolakan ijin oleh pemerintah Kabupaten Sleman kepada calon investor merupakan bentuk strategi pengendalian investasi dan dibenarkan sebagai bentuk perlindungan kepada investor lama yang telah menjadi *pioneer* investasi di Kabupaten Sleman sehingga pasar tetap *stable*. Investor *pioneer* perlu dilindungi karena investor tersebut mempunyai risiko kegagalan investasi yang lebih besar pada awal mereka melakukan investasi daripada calon investor yang datangnya lebih akhir yang tinggal menjalankan investasi dengan pasar yang sudah terbentuk.

Data menunjukkan bahwa selama tahun 2000-2004 rata-rata jumlah pemohon Ijin Perubahan Peruntukan Tanah (IPPT) non-pengeringan yang ditolak sebanyak 6,37% per tahun (BPPD Kabupaten Sleman, 2005:4). Alasan penolakan karena tata ruang tidak sesuai, kondisi calon lokasi tempat investasi adalah lingkungan pertanian, dan tidak sesuai dengan permohonan. Calon investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Sleman seharusnya memperhatikan kekhasan daerah tempat investasi. Hal ini mempertimbangkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah resapan, lumbung beras bagi penduduk Propinsi DIY, daerah lindung bencana, dan sebagai daerah cagar budaya. Berdasarkan data jumlah pemohon IPPT yang ditolak hanya sebanyak 6,37% menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai arah kebijakan dalam mengendalikan kegiatan investasi di Kabupaten Sleman melalui *reallocation* dan redistribusi potensi kekayaan daerah dengan memperhatikan kepentingan investor dan

kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sleman.

Tidak signifikannya faktor modal dan tenaga kerja untuk semua jenis investasi (fasilitas PMA dan PMDN maupun investasi Non Fasilitas) dalam mempengaruhi PDRB Kabupaten Sleman, kecuali faktor modal untuk jenis investasi fasilitas PMDN, karena lahan (sumber daya alam) yang semakin terbatas sebagai tempat bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi, sehingga sangat dimungkinkan menjadi faktor penghambat pertumbuhan nilai PDRB Kabupaten Sleman. Keterbatasan lahan mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan lahan sehingga berpengaruh pada kenaikan harga tanah. Semakin mahalnya harga tanah di Kabupaten Sleman akan menjadi kontraproduktif bagi usaha Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menarik modal asing (PMA), lokal (PMDN), dan bahkan investasi non fasilitas, misalnya perumahan.

Kenaikan harga tanah di Kabupaten Sleman beriringan dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Sleman dari struktur ekonomi yang agraris menuju ke arah industri dan jasa. Perubahan struktur ekonomi tersebut berdampak terhadap kebutuhan lahan yang mengakibatkan permintaan lahan di daerah tertentu sangat tinggi sehingga harga lahan menjadi semakin mahal. Kontribusi peran sektor pertanian cenderung semakin menurun sedang kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran cenderung semakin meningkat. Ini menunjukkan adanya permintaan lahan yang cenderung semakin meningkat sehingga akan menaikkan harga lahan di Kabupaten Sleman mengingat keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Peran pelaku ekonomi di Kabupaten Sleman yang semakin meningkat adalah pelaku ekonomi rumah tangga dalam berkonsumsi, sedang pembentukan modal tetap domestik bruto yang menunjukkan peran investor dalam

melakukan investasi cenderung semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa PDRB yang semakin meningkat selama tahun 2001-2005 sebenarnya bukan karena pengaruh modal dan tenaga kerja menurut jenis investasi tetapi karena kontribusi rumah tangga dalam berkonsumsi yang semakin meningkat dalam kurun waktu yang sama. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan faktor modal dan tenaga kerja yang mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Sleman menurut jenis investasi yang masuk ke Kabupaten Sleman, hanya pengaruh modal menurut jenis investasi fasilitas PMDN yang terbukti secara statistik signifikan mempengaruhi positif nilai PDRB Kabupaten Sleman. Sedangkan faktor tenaga kerja menurut jenis investasi fasilitas PMDN, faktor modal dan tenaga kerja menurut jenis investasi fasilitas PMA, dan faktor modal dan tenaga kerja menurut jenis investasi Non Fasilitas secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Sleman.

### Saran

Keterbatasan lahan untuk kegiatan ekonomi dan faktor pengeluaran konsumsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi menjadi pembatas faktor modal dan tenaga kerja dalam mempengaruhi PDRB Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengatur secara jelas *allocation* dan *reallocation* potensi kekayaan daerah dengan peraturan perundangan yang benar dan baik agar tujuan pembangunan meningkatkan kemakmuran masyarakat dapat tercapai mengingat masyarakat

mempunyai peran sebagai subyek dan obyek pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. *Teori Ekonomi Mikro*. Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 2003.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Ed. 4, BP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badrudin, R. 2000. "Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. FE UII. Yogyakarta.
- Badrudin, R. 2009. "Dampak Kegiatan Investasi Terhadap Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Sleman Pasca Otonomi Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3 (2)
- BPPD Kabupaten Sleman. 2005. *Laporan Tahunan*.
- BPS Kabupaten Sleman. 2006. *Sleman Dalam Angka*.
- P2KPM Kabupaten Sleman. *Investasi di Kabupaten Sleman Tahun 2006*.
- Purnamawati, A. dan Badrudin, R. 2004. "Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, Tahun 2001". *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, STIE YKPN, 1(3):
- Subiyakto, H.. 2004. *Praktikum Statistika dengan Microsoft Excel for Windows*. BP STIE YKPN. Yogyakarta.

Subiyanto, I. 2005. Kemampuan Keuangan Daerah yang Terbatas, Strategi Pengembangan Kapasitas, dan Program Prioritas. Makalah Lokakarya "On Good Governance Best Practices in Kabupaten/Kota", Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) dan United Nation Development Programme (UNDP). Banda Aceh.